

## **KINERJA PEMERINTAHAN KELURAHAN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN TERHADAP PENANGGULANGAN BENCANA (Study Pada Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara)**

**Sunardi<sup>1</sup>, Adri Patton<sup>2</sup>, Haryono<sup>3</sup>**

### *Abstrak*

*Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi; prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana; cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabeliras, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif, dan nonproletisi. Di Kelurahan Lempake Samarinda Utara Provinsi Kalimantan Timur, program pemberdayaan kelurahan merupakan salah satu program penting dalam Penanggulangan Bencana (PB). Melalui pemberdayaan kelurahan dalam penanggulangan bencana di harapkan masyarakat dapat lebih mandiri dan berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Sudah barang tentu peran lurah (pemerintah) melalui pemberdayaan kelurahan dapat memberikan pelayanan kebencanaan kepada seluruh masyarakat dan dunia usaha.*

**Kata Kunci :** *Bencana, kelurahan, pemberdayaan,*

### **Pendahuluan**

Pelaksanaan pembangunan di daerah sebagai bagian internal dari pembangunan nasional yang berdasarkan prinsip otonomi daerah dengan pelaksanaan yang membuat masyarakat di daerah mandiri dalam melaksanakan pembangunannya. Sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab penyelenggara kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang nyata dan

- 
1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL - Samarinda
  2. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.
  3. Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip UNMUL – Samarinda.

bertanggungjawab di daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemampatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan dalam pembangunan. Kesemuanya diujutkan dengan Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada BAB III, Tanggungjawab dan Wewenang, Pasal 5 “ Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”. Pada Pasal 6 “ Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana
- c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil serta sesuai dengan standar pelayanan minimum
- d. pemulihan kondisi dari dampak bencana
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai
- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai: dan
- g. perliharan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana; cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabelitas, kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif, dan nonproletisi. Dan pelaksanaan penanggulangan bencana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi; prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.

Otonomi daerah yang sarat dengan isu strategi berupa kelembagaan, sumber daya manusia berupa aparatur pelaksana, jaringan kerja serta lingkungan kondusif yang terus berubah merupakan sebuah tantangan bagi Kelurahan Lempake untuk menanggapi serta mensiasatinya dengan tanggap dan cepat agar tidak ketinggalan dari kelurahan-kelurahan lainnya dalam memacu gerak pembangunan.

Dengan demikian di perlukan kinerja yang lebih insentif dan optimal dari bagian organisasi demi optimalisasi bidang tugas yang diembannya. Kinerja suatu organisasi sangat penting, dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga akan dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah dipikul melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara nyata dan maksimal.

Dan tuntutan pembangunan di era otonomi: Pemerintah Kota Samarinda mengambil kebijakan “ Program Penanggulangan Bencana Secara Tuntas dan Menyeluruh”, dengan memperdayakan masyarakat. Hal ini

diperkuat dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kota Samarinda.

Kelurahan sebagai organisasi pemerintah yang paling dekat dan berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan ujung tombak keberhasilan penanggulangan bencana, dimana kelurahan akan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengendalian penanggulangan bencana. Dikatakan sebagai ujung tombak karena kelurahan berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak yang berkopeten untuk ditindak lanjuti. Disamping itu peran kelurahan di atas menjembatani program-program pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat.

Dengan begitu luas dan kompleksnya permasalahan yang ada di Kota Samarinda, seperti dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat ,pembangunan yang harus dilakukan Pemerintah Kota Samarinda, ditambah dengan penanggulangan bencana untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Maka baik visi, misi dan fungsi Kota Samarinda mengkondisikan perlunya suatu upaya Perberdayaan Masyarakat, salah satunya adalah “Program Perberdayaan Kelurahan Terhadap Penanggulangan Bencana”.

Dalam pelaksanaan “Program Perberdayaan Kelurahan Terhadap Penanggulangan Bencana ” di Kota Samarinda, kelurahan sebagai ujung tombak pemerintahan diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mensukseskan program ini. Dalam Program Pemberdayaan Kelurahan Terhadap Penanggulangan Bencana pihak kelurahan dengan melakukan kegiatan-kegiatan prabencana, saat bencana dan pascabencana.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Undang-Undang Kebencanaan***

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau factor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Upaya pengurangan resiko bencana adalah sebuah proses panjang. Proses ini dimulai dengan adanya perhatian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB, United Nations) terhadap masalah pengurangan resiko bencana. Perhatian ini terwujud dengan dikeluarkannya resolusi PBB dalam sidang Majelis Umum ke 20 mengenai bantuan dalam situasi bencana alam dan bencana lainnya pada tanggal 14 Desember 1971. Resolusi ini kemudian di tindak lanjuti dengan Resolusi Nomor 46/182 tahun 1991 mengenai Penguatan koordinasi bantuan

kemanusiaan PBB dalam hal bencana, serta ditegaskan kembali pada pertemuan dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg tahun 2002. Dikemukakan bahwa “pengurangan resiko bencana adalah aktifitas pembangunan jangka panjang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan yang berkelanjutan”.

Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 1999, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengeluarkan Resolusi nomor 63 tahun 1999 tentang Dekade Pengurangan Resiko Bencana Internasional. Dalam resolusi ini Dewan Ekonomi dan Sosial mengharapkan agar PBB memfokuskan tindakan kepada pelaksanaan Strategi Internasional untuk Pengurangan Resiko Bencana (International Strategy for Disaster Reduction/ISDR). Strategi ini merupakan landasan dari kegiatan PBB dalam pengurangan resiko bencana yang sekaligus memberikan arahan kelembagaan melalui pembentukan kelompok kerja lintas instansi-lembaga-organisasi. Sasaran utama ISDR adalah:

- a. Untuk mewujutkan ketahanan masyarakat terhadap dampak bencana alam, teknologi dan lingkungan;
- b. Mengubah pola perlindungan terhadap bencana menjadi manajemen resiko bencana dengan melakukan penggabungan strategi pencegahan resiko ke dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan.

Strategi Internasional untuk Pengurangan Resiko Bencana dilakukan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bencana alam, teknologi, lingkungan dan bencana sosial.
- a. Mewujutkan komitmen pemerintah dalam mengurangi resiko bencana terhadap manusia, kehidupan manusia, infrastruktur sosial dan ekonomi serta sumber daya lingkungan.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko bencana melalui peningkatan kemitraan dan perluasan jaringan upaya pengurangan resiko bencana.
- c. Mengurangi kerugian ekonomi dan sosial akibat bencana.

Strategi Yokohama ditetapkan pada tahun 1994. Dokumen ini merupakan panduan internasional bagi upaya pengurangan resiko dampak bencana. Strategi Yokohama menitik beratkan pada upaya melakukan kegiatan yang sistematis untuk menerapkan upaya pengurangan resiko bencana dalam pembangunan berkelanjutan. Beberapa isu dan tantangan yang teridentifikasi dalam strategi Yokohama antara lain:

- a. Tata pemerintahan, organisasi, hukum, dan kerangka kebijakan;
- b. Identifikasi resiko, pengkajian, monitoring dan peringatan dini;
- c. Pengetahuan dan pendidikan;
- d. Mengurangi faktor-faktor penyebab resiko bencana;
- e. Persiapan tanggap darurat dan pemulihan yang efektif.

Kelima aspek diatas merupakan kunci dasar pengembangan kerangka rencana aksi pengurangan resiko bencana. Aspek-aspek tersebut dijabarkan melalui prinsip-prinsip dasar dalam upaya pengurangan resiko bencana, yaitu:

- a. Pengkajian resiko bencana adalah langkah yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan dan upaya pengurangan resiko bencana yang efektif.
- b. Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sangat penting dalam mengurangi kebutuhan tanggap bencana.
- c. Pencegahan dan kesiapsiagaan merupakan aspek terpadu dari kebijakan pembangunan dan perencanaan pada tingkat nasional, regional dan internasional.
- d. Pengembangan dan penguatan kemampuan untuk mencegah, mengurangi dan mitigasi bencana adalah prioritas utama dalam Dekade Pengurangan Resiko Bencana Alam Internasional.
- e. Peringatan dini terhadap bencana dan penyebarluasan informasi bencana yang dilakukan secara efektif dengan menggunakan sarana telekomunikasi adalah faktor kunci bagi kesuksesan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.
- f. Upaya pencegahan akan sangat efektif bila melibatkan partisipasi masyarakat lokal (lembaga adat dan budaya setempat), nasional, regional dan internasional.
- g. Kerentanan terhadap bencana dapat dikurangi dengan menerapkan desain dan pola pembangunan yang dipokuskan pada kelompok-kelompok masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan yang tepat.
- h. Masyarakat internasional perlu berbagi teknologi untuk mencegah, mengurangi dan mitigasi bencana, dalam hal ini sebaiknya dilaksanakan secara bebas dan tepat waktu sebagai bagian dari kerjasama dan teknik.
- i. Perlindungan lingkungan merupakan salah satu komponen pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan pengentasan kemiskinan dan merupakan upaya yang sangat penting dalam pencegahan dan mitigasi bencana.
- j. Setiap Negara bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat, infrastruktur dan asset nasional lainnya dari dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Sebagaimana dalam UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, ada tiga hal penting dalam perubahan paradigma penanggulangan bencana yaitu:

- a. Dari respon darurat ke manajemen resiko: pergeseran ini mendorong perubahan radikal cara pandang. Tadinya penanggulangan bencana dipandang sebagai rangkaian tindakan khusus terbatas pada keadaan darurat, dilakukan oleh para pakar saja, kompleks, mahal, dan cepat. Sekarang penanggulangan bencana bukan sekedar langkah merespon kedaruratan, melainkan tindakan untuk melakukan manajemen resiko.
- b. Perlindungan rakyat sebagai wujud pergeseran cara pandang dari kekuasaan pemerintah ke perlindungan sebagai hak asasi rakyat. Tadinya, perlindungan diberikan sebagai bukti kemurahan penguasa untuk rakyatnya. Dengan

demokratisasi dan otonomi daerah, akuntabilitas pemerintah daerah bergeser lebih dekat ke pada konstituen. Pemerintah daerah adalah pihak yang diberi mandate oleh konstituennya untuk, antara lain menciptakan dan membagi kesejahteraan, dan memastikan perlindungan. Pergeseran ini mengharuskan pemerintah daerah untuk melihat perlindungan sebagai suatu mandate yang sama dengan mandate ekonomi dan kesejahteraan.

- c. Dari tanggung jawab pemerintah ke urusan bersama masyarakat. Ini berkaitan dengan bagaimana membawa penanggulangan bencana dari ranah pemerintah ke arah urusan kemaslahatan bersama, dimana semua aspek penanggulangan bencana, mulai kebijakan, kelembagaan, koordinasi dan mekanisme harus mengalakkan peran serta masyarakat luas dan dunia usaha.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor

Bencana nonalam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.

Bencana social adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik social antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah tepat guna dan berdaya guna.

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Mitigasi adalah serangkain upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadi bencana untuk menanggapi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, emenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,

pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public atau masyarakat samapai pada tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran untuk normalisasi dan berjalanya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Untuk penentuan tingkat ancaman bencana digunakan matriks penentuan tingkat ancaman yang memadukan indeks ancaman pada lajur dengan indeks penduduk terpapar pada kolom. Titik pertemuan antara indeks ancaman dengan indeks penduduk terpapar adalah tingkat ancaman. Skala indeks ancaman dibagi dalam beberapa kategori yaitu : rendah (0,0 – 0,3), sedang (> 0,3 – 0,6), dan tinggi (> 0,6 – 1,0). Sedangkan skala indeks penduduk terpapar dibagi dalam 3 kategori, yaitu: rendah, sedang dan tinggi, dengan masing-masing nilai indeks sebagai berikut:

1. Rendah :apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar kurang dari 500 jiwa/km<sup>2</sup>, dan jumlah penduduk kelompok rentan kurang dari 20%.
- 2.Sedang :apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar 500–1000 jiwa/km<sup>2</sup>, dan jumlah penduduk kelompok rentan 20% – 40%.
- 3.Tinggi :apabila kepadatan jumlah penduduk terpapar lebih dari 1000 jiwa/km<sup>2</sup>, dan jumlah penduduk kelompok rentan lebih dari 40%.

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologi, hidrologis, klimatologis, geografis, social, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan.prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah

### ***Konsep Kepemimpinan***

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang berarti seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga ia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi tercapainya suatu maksud dan beberapa tujuan (Kartono, 1993:76). Kepemimpinan pada dasarnya mempunyai pokok pengertian sebagai sifat, kemampuan, proses dan atau konsep yang dimiliki oleh seseorang sedemikian rupa sehingga ia diikuti, dipatuhi, sehingga orang lain bersedia dengan penuh keikhlasan melakukan perbuatan atau kegiatan yang dikehendaki pemimpin tersebut. Kepemimpinan dapat timbul apabila terdapat faktor-faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor-faktor tersebut meliputi orang-orang bekerja dari sebuah posisi organisasi, dan timbul dalam situasi yang spesifik (Winardi,2000:48).

Menurut Tannenbaum, Weschler dan Massarik dalam Yuki (1994:5), kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi, yang dijalankan dalam situasi tertentu serta diarahkan proses komunikasi kearah pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Siagian (2002:62) Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, dalam hal para bawahannya sedemikian rupa, sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin meskipun secara pribadi hal itu tidak disenanginya.

Sunindhia (1993:4) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerja sama menuju kepada suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama. Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kepemimpinan tidak harus dibatasi oleh aturan-aturan atau tatakrama birokrasi.



Menurut Hadari Nawawi (1995:75), secara oprasional dapat dibedakan atas fungsi pokok kepemimpinan:

a. Fungsi Instruktif

Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang lain yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah

b. Fungsi Konsultatif

Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya.

c. Fungsi Partisipasi

*Dalam menjalankan tugas fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi masing-masing*

d. Fungsi Delegasi

*Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggungjawab. Fungsi pendelegasian ini, harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin seorang diri.*

e. Fungsi pengendalian

*Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengawasan*

Mangunhardjo (1996): mengemukakan bahwa pemimpin ialah seseorang yang bergerak lebih awal, berjalan di depan, mengambil langkah pertama, berbuat paling dulu, mempelopori, mengarahkan pikiran, pendapat, tindakan orang lain, membimbing, menuntun dan menggerakkan orang lain melalui pendapatnya.

Menurut Siagian (1982), kepemimpinan adalah “seni kemampuan untuk mempengaruhi perilaku manusia dan kemampuan mengendalikan orang-orang dalam organisasi“.Jadi pada intinya kepemimpinan itu adalah proses pengaruh yang memungkinkan orang-orang yang bersedia mengerjakan apa yang harus dikerjakan dan mengerjakan dengan baik.

Dari pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam kehidupan berorganisasi terdapat dua peran yaitu sebagai pimpinan dan sebagai bawahan. Kedua peranan ini sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi dimana antara pemimpin dan bawahan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat di pisahkan.

Menurut Monier (1983) “Kepemimpinan kerja atau kepemimpinan manajemen (*management leadership*), yaitu suatu kepemimpinan yang bersifat sebagai proses pengarahan terhadap pencapaian tujuan itu dengan cara mempengaruhi, memotivasi dan mengendalikannya”. Ditinjau dari segi manajemen, kepemimpinan harus mampu untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain agar rela, mampu dan dapat mengikuti keinginan manajemen (*organisasi*) demi tercapainya tujuan yang telah di tetapkan secara efektif, efisien dan ekonomis.

Menurut pendapat Siagian, (1982) dalam setiap organisasi ada dua pola dasar kepemimpinan yaitu:

a. Kepemimpinan formal

Kepemimpinan secara resmi pada seseorang yang diangkat dalam jabatan kepemimpinan yang memiliki wewenang dan kekuasaan tertentu. Pola itu dapat terlihat dalam berbagai ketentuan yang mengatur hirarki organisasi dan biasanya tergambar dalam bagan (*struktur*) organisasi. Kepemimpinan formal tidak secara otomatis merupakan jaminan bahwa seseorang yang secara formal diangkat menjadi pimpinan dalam organisasi akan diterima pula oleh para anggota organisasi sebagai pimpinan yang sebenarnya.

b. Kepemimpinan informal

Kepemimpinan yang tidak di dasarkan kepada pengangkatan, kepemimpinan informal tidak terlihat dalam hirarki atau struktur organisasi, efektifitas kepemimpinan informal terlihat pada pengakuan nyata dan memiliki kewibawaan serta di terimanya dalam praktek atas kepemimpinannya. Pemimpin formal dalam menjalankan tugasnya memiliki wewenang dan kekuasaan, namun apabila wewenang tersebut tidak disertai wibawa, maka untuk jangka panjang wewenang dan kekuasaan tersebut tidak akan membuahkan hasil (pencapaian tujuan organisasi) atau lebih tegasnya dua wajah kepemimpinan seperti tersebut di atas hendaknya menyatu dalam pribadi yang sesungguhnya yang memiliki wewenang dan kekuasaan serta di dukung dan memperoleh

*legitimacy* dari seluruh komponen yang terdapat di dalam suatu organisasi.

Menurut Siagian (1982) seseorang hanya akan menjadi pemimpin apabila:

- a. Seseorang secara genetika telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan.
- b. Bakat-bakat tersebut di pupuk dan dikembangkan melalui kesempatan untuk menduduki jabatan kepemimpinan.
- c. Didasari oleh pengetahuan teoritikal yang di peroleh dari pendidikan dan latihan, baik yang bersifat umum maupun yang menyangkut teori kepemimpinan.

Davis dalam Wahjosumidjo, (1987) mengemukakan empat macam kelebihan sifat yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu:

- a. Intelegensia (*intelegence*), pada umumnya pemimpin memiliki kecerdasan yang relatif lebih tinggi dari bawahannya .
- b. Kematangan dan keleluasaan pandangan sosial (*social maturity and breadth*), seseorang pemimpin harus lebih matang dan luas dalam hal-hal yang bertalian dengan masyarakat. Sehingga dengan kematangan tersebut diharapkan dapat mengendalikan keadaan, kerja sama sosial serta mempunyai keyakinan dan kepercayaan diri sendiri.
- c. Mempunyai motivasi dan keinginan berprestasi yang datang dari dalam (*inner motivation and achievement desires*), seseorang pemimpin diharapkan harus selalu mempunyai dorongan yang besar untuk dapat menyelesaikan sesuatu.
- d. Mempunyai kemampuan untuk mengadakan hubungan antara manusia (*human relation attitudes*), seorang pemimpin harus lebih mengetahui terhadap bawahannya sebab dalam kehidupan berorganisasi di perlukan adanya kerja sama atau saling ketergantungan antara anggota-anggota kelompok, pemimpin harus berorientasi kepada bawahaan.

Sedangkan menurut Milet dalam Wahjosumidjo, (1987) sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan melihat organisasi sebagai suatu keseluruhan (*the ability to see an enterprise as a whole*).
- b. Kemampuan mengambil keputusan (*the ability to make dicision*)
- c. Kemampuan untuk melimpahkan atau mendelegasikan wewenang (*the ability to delegate authority*).
- d. Kemampuan menanamkan kesetiaan (*the ability to command loyalty*).
- e. Keberhasilan seorang pemimpin sangat di pengaruhi oleh keberhasilan dalam mempengaruhi orang-orang dan memanfaatkan seseorang, karena itu kualifikasi kepribadian merupakan fenomena yang sangat menentukan.

Agak sulit untuk menentukan bagaimana seharusnya sifat, watak, perangai, perilaku seorang pimpinan yang efektif. Demikian juga tidak mudah apa dan bagaimana seseorang pimpinan yang baik. Dalam situasi ini dan kondisi bagaimana seseorang pimpinan menjadi efektif. Kecakapan, kemampuan dan sebagainya. Namun diakui secara umum bahwa pemimpin yang berhasil adalah mereka yang mempunyai pengertian, bakat dan kemampuan istimewa.

Banyak para ahli yang mencantumkan sederetan unsur karakteristik yang dianggap penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Sifat, perangai dan watak kepemimpinan, berikut ini banyak di kenal oleh para penulis. Adapun watak kepemimpinan, mencakup unsur sebagai berikut (Subagyo, 1990) :

- a. Toleransi (*tolerance*)
- b. Keuletan (*stability*)
- c. Keterbukaan (*frankness*)
- d. Tegak pendirian (*fimaness*)
- e. Rasa kesungguhan (*serios-mindedness*)
- f. Tenang (*tranquaility*)
- g. Kesepakatan (*acceptance*)
- h. Kecakapan menganalisa (*analytical ability*)
- i. Dorongan dan inisiatif (*drive and initiative*)
- j. Terarah (*direction*)
- k. Tanggap dan terampil (*acutenes*)
- l. Organisasi yang efektif (*organization effectiveness*)
- m. Pengabdian kepada masyarakat (*public service*)
- n. Cakap dan luwes (*capacity and flexibility*)

Dari definisi kepemimpinan di atas mencerminkan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses sosial yang dalam hal ini pengaruh yang sengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas-aktivitas serta hubungan-hubungan dalam sebuah kelompok atau organisasi

### ***Konsep Pemberdayaan***

Pemberdayaan adalah upaya memberdayakan (mengembangkan klien dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya) guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Jadi pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan masyarakat dari keadaan kurang atau tidak berdaya mnjadi punya daya dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat mencapai atau memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Payne (1997:226) mengemukakan lebih jauh inti dari tujuan pemberdayaan di lakukan: “ *to help clients gain power op decision and action over their own lives by reducing the effct of social or personal block to*

*exercising cacity and self-confidence touse power and by transferring power from the environment to clients."*

Shardlow (1998:32) melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok maupun komunitas berusaha mengkonrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Gagasan Shardlow ini, tidak jauh dengan gagasan yang mengartikan pemberdayaan sebagai upaya mendorong klien untuk menentukan diri sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitanya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya. Pemberdayaan merupakan suatu bentuk upaya memberikan kekuatan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan berbagai bentuk inovasi kreatif sesuai dengan kondisi, yang secara potensil dimiliki. Disamping itu secara bertahap masyarakat juga mendorong untuk meningkatkan kapasitas dirinya untuk mengambil peran yang sejajar dengan mereka yang lebih berdaya melalui proses penyadaran.

Konsep pemberdayaan pada hakikatnya dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan keberdayaan, yaitu kemampuan dan kemandirian. Menurut Kartasmita (1996:2) keberdayaan merupakan unsure-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*) dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Unsur-unsur yang menjadi sumber keberdayaan masyarakat dimaksud adalah nilai kesehatan, pendidikan, prakarsa, keluarga, kegotongroyongan, perjunagan dan sebagainya.

Secara etimologi, pemberdayaan berasal dari kata berdaya yang artinya kerkakuan, berkemampuan tenaga (Kamus Besar Bahasa Indonesia,1998:189). Menurut Sumodiningrat, (1999) pengertian pemberdayaan adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian. Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk program pembangunan ( *United Nations Development Programme*) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai proses dimana semua usaha swadaya masyarakat digabungkan dengan usaha yang dilakukan pemerintah guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, social dan budaya. Atau pengertian tersebut dapat disederhanakan menjadi suatu metode atau pendekatan yang menekankan adanya partisipasi umum dan ketertipan langsung penduduk dalam proses pembangunan.

Pemberdayaan (*empowerment*) dalam studi kepustakaan memiliki kecenderungan dalam dua proses. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses pemberian atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya, dan kedua, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan kehidupan melalui proses dialog.

Menurut Prijono (1996:208-209), pemberdayaan terdiri dari pemberdayaan pendidikan, ekonomi, social budaya, psikologis dan politik.

Pemberdayaan Pendidikan merupakan factor kunci yang ditunjang dan dilengkapi oleh pemberdayaan lain yaitu:

- a. Pemberdayaan pendidikan. Pemberdayaan pendidikan merupakan kunci pemberdayaan masyarakat. Oleh karena pendidikan dapat meningkatkan pendapatan, kesehatan, produktivitas. Sering masyarakat berpendidikan rendah yang salah satu penyebabnya adalah factor ekonomi, kerana dalam pendidikan itu sendiri membutuhkan biaya yang cukup banyak.
- b. Pemberdayaan ekonomi. Akses dan penghasilan atas pendapatan bagi setiap orang merupakan hal penting karena menyangkut otonominya (kemandirian). Sehingga dengan factor ekonomi tersebut memungkinkan manusia untuk mengontrol dan mengendalikan kehidupannya sesuai dengan yang mereka inginkan.
- c. Pemberdayaan social budaya. Dalam kehidupan masyarakat hendaknya tidak ada pembedaan-pembedaan peran dan tanggungjawab dalam kehidupan masyarakat. Setiap manusia hendaknya memiliki peran dan tanggungjawab yang sama sehingga dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara bersama-sama.
- d. Pemberdayaan psikologis. Pemberdayaan sebagai perubahan dalam cara berfikir manusia. Pemberdayaan tidak bermaksud membekali manusia dengan kekuasaan dan kekayaan, tetapi membuat mereka sadar terhadap dirinya dan apa yang diinginkan dalam hidup ini. Intraksi antara masyarakat didasarkan atas pengambilan keputusan bersama, tanpa ada yang memerintah dan diperintah, tidak ada yang merasa menang atau kalah. Pemberdayaan didasarkan atas kerjasama, untuk mencapai tujuan dengan hubungan timbale balik yang saling memberdayakan.
- e. Pemberdayaan politik. Pemberdayaan politik pada intinya adalah bagaimana setiap orang dapat memiliki peluang dan partisipasi yang sama dalam kegiatan-kegiatan politik. Seperti kesempatan bersama dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan, ketertiban lembaga-lembaga politik, kesempatan untuk memberikan pendapat dan menyampaikan hak suara dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaanya, pemberdayaan menurut Midgley dalam Adi (2003:49-50) diidentikkan dengan pembangunan social yang dapat dilakukan oleh individu, masyarakat atau komunitas maupun oleh pemerintah, yaitu:
  - a. Pembangunan social melalui individu (*Social Development By Individual*), dimana individu-individu dalam masyarakat secara swadya membentuk usaha pelayanan masyarakat pada pendekatan individual ataupun perusahaan (*individuals or enterprise approach*).
  - b. Pembangunan social melalui komunitas (*Social Development By Communities*), dimana kelompok masyarakat secara bersama-sama berupaya mengembangkan komunitas lokalnya. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan kmunitarian (*communitarian approach*).

- c. Pembangunan social melalui pemerintah ( *Social Development By Governments*), dimana pembangunan social dilakukan oleh lembaga-lembaga didalam organisasi pemerintah (*governmental agencies*). Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan statis (*statist approach*).

### ***Pelaksanaan Pemerdayaan Kelurahan pada Kelurahan Lempake dalam Penanggulangan Bencana***

Berdasarkan hasil penelitian dengan narasumber maka dapat disimpulkan bahwa dalam rangka pemberdayaan kelurahan telah banyak dilakukan oleh pemerintah kelurahan yang nota bene merupakan pelayan dan pengayom masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian, sampai saat ini upaya-upaya tersebut masih perlu untuk diteruskan agar masyarakat berperan aktif dalam penanggulangan bencana.

### ***Upaya yang Sudah Dilakukan untuk Pemberdayaan Kelurahan dalam Penanggulangan Bencan.***

Meningkatkan pelayanan khususnya dalam penanggulangan bencana(prabencana, saat bencana an pascabencana) agar sesuai dengan apa yang diharapkan, sebagai berikut

- a. Pelayanan di bidang pembagunan dan pembinaan masyarakat kemasyarakatan
- Mempasilitasi dan mendukung organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) dalam kegiatan; agama, pemuda dan oleh raga, kesra, ekonomi, koperasi, lingkungan hidup dan pembangunan, kesehatan dan KB, pemberdayaan kelurga, humas, perberdayaan SDM
  - Mempasilitasi dan mendukung organisasi PKK dan POKJA
  - Mempasilitasi dan mendukung organisasi PSM(pekerja Sosial Masyarakat)
  - Mempasilitasi dan mendukung organisasi Pramuka Peduli Bencana binaan BPBD Prov Kaltim dan Polesta Samarinda Utara. Pembinaan dilakukan agar pramuka dapat melakukan pertolongan pertama pada saat bencana, melakukan pembuatan tempat penampungan sementara pada korban bencana, melakukan pendataan korban, kerusakan dan kerugian dan melakukan dan melaksanakan dapur umum, air bersih dan MCK
- b. Melakukan melakukan sosialisasi dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong pada masyarakat. Dalam sosialisasi tersebut pihak kelurahan memberi berbagai himbauan kepada masyarakat untuk bertujuan menjaga kebersihan lingkungan dan mengajak masyarakat untuk secara langsung berperan serta menjaga kebersihan lingkungan dengan mengadakan gotong-royong yang ditentukan pihak kelurahan dan masyarakat. Yang pelaksanaanya setiap Jum'at bersih di lokasi-lokasi yan

telah ditentukan untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dan pencegahan banjir. Karena dengan menjaga pemukiman dan lingkungan merupakan usaha untuk mencegah bencana seperti banjir, penyakit ISPA, demam berdarah, malaria, diare dan lain-lain.

c. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertipan pada masyarakat dan lingkungan dengan;

- Mendata masyarakat menurut kelompok umur:

Data menyebutkan bahwa kelompok umur ; 00 – 12 bulan berjumlah 527 orang, 01 – 05 tahun berjumlah 1.488 orang, 05 – 07 tahun berjumlah 1.537 orang, 07 – 15 tahun berjumlah 3.087 orang, 15 – 56 tahun berjumlah 7.085 orang dan umur 56 tahun keatas berjumlah 2.032 Orang. Dari data kependudukan dapat diambil kesimpulan, bahwa jumlah kelompok rentan ( anak-anak, wanita, dan lansia) yang berada di Kelurahan Lempake berjumlah 8671 orang.

Karena jumlah penduduk kelompok rentan 8671 orang dan lebih dari 40% maka dikategorikan dalam indeks penduduk terpapar tinggi. Yang masuk dalam kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil dan menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia. Dari data tersebut Kelurahan Lempake telah melakukan pendataan masyarakat yang berada di wilayah kerjanya. Selain itu kelurahan lempake sudah memiliki data masyarakat dalam kelompok rentan dan menjadi prioritas utama dalam penanggulangan bencana(prabencana, saat bencana dan pascabencana)

- Mendata status kepemilikan tanah

Di Kelurahan Lempake status kepemilikan tanah menyebutkan bahwa; sertifikat Hak Milik ada 1430 buah, sertifikat Hak Guna Usaha ada 11 buah dengan luas 408,7 Ha, sertifikat Hak Guna Pembangunan 10 buah, sertifikat Hak Pakai sebanyak 124 buah. Tanah yang sudah bersertipikat sebanyak 40 buah, tanah yang bersertipikat melalui PRONA sebanyak 1874 buah dan tanah yang belum bersertipikat sejumlah 3071. Dari data yang di dapat, banyak tanah masyarakat yang belum bersertipikat dari BPN (Badan Pertanahan Negara) Kota Samarinda.

Kondisi ini rentan sekali terjadi konflik setatus kepemilikan tanah. Bila hal ini resiko terjadi bencana konflik social antara masyarakat. Pemerintah Kelurahan Lempake telah berupaya dengan melaporkan ke Kecamatan Samarinda Utarara, berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional wilayah Kota Samarinda untuk pengusulan Sertipikat Program PRONA dari BPN, berkoordinasi dengan Polresta Samarinda Utara. Untuk menghindari masalah-masalah konflik pertanahan. Pihak kelurahan telah melakukan sosialisasi kepada ketua RT dan masyarakat. Dan menganjurkan sebelum membeli tanah agar berkoordinasi terlebih dahulu ke pihak pemerintah kelurahan, untuk mengetahui status tanah yang akan dibeli(bermasalah atau tidak)



- Mendata jumlah pemeluk agama atau penganut kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat kelurahan Lempake  
Di kelurahan Lempake menyebutkan bahwa; jumlah pemeluk agama Islam; 11.745 orang, jumlah pemeluk agama Kristen; 3.130 orang, jumlah pemeluk agama Katholik; 569 orang, jumlah pemeluk agama Hindu; 156 orang dan jumlah pemeluk agama Budha; 147 orang.  
Dari data diatas menyebutkan bahwa masyarakat yang beragama Islam lebih banyak (11.745 orang) dan masyarakat yang beragama di luar Islam sedikit(4.002 orang). Kondisi ini rentan terjadi konflik antar agama. Pada saat ini Kelurahan Lempake telah melakukan sosialisasi Keagamaan kepada Ketua RT dan masyarakat, agar dalam membangun atau memungsikan tempat atau bangunan terlebih dahulu melaporkan ke ketua RT dan pemerintah kelurahan. Dan menganjurkan pada semua umat agama untuk saling menghormati dalam beragama.

#### ***Faktor Pendukung Pemberdayaan Kelurahan dalam Penanggulangan Bencana.***

- a. Jumlah sarana dan prasarana yang cukup di dukung dengan sumber daya manusia yang propesoinal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
- b. Ada 11 organisasi social dan 5 organisasi kemasyarakatan
- c. Ada 20 tokoh masyarakat dan politik
- d. Ada 17 Masjid, 26 Musholla dan 6 gereja.
- e. Ada 43 Majelis Ta'lim dan 6 kelompok Majelis Gereja
- f. Ada 1 Puskesmas dan 3 Puskesmas Pembantu
- g. Ada 3 buah lapangan sepak bola, 1 lapangan basket dan

Dari hasil penelitian, wawancara dan data yang diperoleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung tersebut di atas dapat diperoleh apabila semua pihak, baik pihak manajemen rumah sakit maupun pemerintah (baik eksekutif maupun legislatif) secara bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan Kab. PPU menjadi daerah yang memberikan pelayanan kesehatan secara prima.

#### ***Faktor Penghambat Pemberdayaan Kelurahan dalam Penanggulangan Bencana.***

1. Belum adanya peraturan tentang Pengurangan Resiko Bencana(PRB) dan penanggulangan bencana (PB) yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha di Kelurahan Lempake.

2. Belum adanya penyusunan Penanggulangan Bencana, rencana kontinjensi bila menghadapi ancaman, dan rencana aksi PRB komunitas di Kelurahan Lempake
3. Belum adanya pembentukan lembaga penanggulangan bencana kelurahan dan kelompok-kelompok siaga bencana di tingkat RT/RW di Kelurahan Lempake.
4. Belum adanya mobilisasi dana dan sumber daya (APBD Kota, sektor swasta dan mandiri) di Kota Samarinda
5. Belum adanya pengembangan kapasitas dalam; analisa ancaman, kerentanan kapasitas, gladi dan simulasi bencana, kegiatan mitigasi, kegiatan pengurangan resiko bencana berbasis komunitas, system peringatan dini di Kota Samarinda.

Dari hasil penelitian, wawancara dan data yang diperoleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat tersebut di atas dapat terujung apabila semua pihak mau terlibat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dengan bertidak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta terencana, terpadu dan menyeluruh.

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan pemberdayaan kelurahan dalam penanggulangan bencana di Kelurahan Lempake secara umum baik, meskipun masih ada kekurangan;

- a. Pelayanan di bidang pembagunan dan pembinaan masyarakat kemasyarakatan khususnya penanggulangan bencana dengan memfasilitasi dan mendukung organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), organisasi PKK dan POKJA, organisasi PSM (pekerja Sosial Masyarakat), organisasi Pramuka Peduli Bencana, sosialisasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dan Jum'at bersih.
- b. Pelayanan di bidang pembinaan ketentraman dan ketertipan pada masyarakat dan lingkungan dengan mendata masyarakat menurut kelompok umur dengan kategori kelompok rentan (anak-anak, wanita, dan lansia) yang berada di Kelurahan Lempake berjumlah 8671 orang. dan menjadi prioritas utama dalam penanggulangan bencana (prabencana, saat bencana dan pascabencana), mendata status kepemilikan, berkoordinasi dengan BPN (Badan Pertanahan Negara) Kota Samarinda untuk mendapatkan Program PRONA, melakukan sosialisasi kepada ketua RT serta masyarakat, mendata dan melakukan sosialisasi Keagamaan kepada Ketua RT dan masyarakat, serta menyarankan untuk saling menghormati dalam beragama.

### **Saran**

Mengingat tingkat ancaman bencana epidemi dan wabah penyakit, memiliki tingkat ancaman rendah dan untuk jenis bencana banjir, cuaca ekstrim,

kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, dan konflik sosial memiliki tingkat ancaman sedang. Oleh sebab itu saran yang dapat kami berikan adalah :

1. POSKO bencana dalam masa tanggap darurat hanya satu, dibawah komando lurah atau aparat kelurahan, pos yang lain bernama pos pembantu
2. Penertipan bantuan-bantuan dari masyarakat, lembaga dan partai politik dibawah koordinasi POSKO
3. Pendistribusian bantuan diatur oleh POSKO
4. Data dan laporan perkembangan yang dipublikasikan hanya satu pintu yaitu informasi data atau data berasal dari POSKO

### ***Daftar Pustaka***

- Anonim.2007. *UU No. 24 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Penanggulangan Bencana*. Jakarta: BNPB.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*. Jakarta : BNPB.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana*. Jakarta : BNPB.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana*. Jakarta : BNPB.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana*. Jakarta : BNPB.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan* . Samarinda : Sekda Prov Kaltim
- \_\_\_\_\_. 2006. *Peraturan Daerah No. 01 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Samarinda* . Samarinda : Sekda Kota Samarinda.
- \_\_\_\_\_.2006. *Peraturan Walikota No. 10 Tahun 2006 tentang Penetapan 11(sebelas) Kelurahan Baru* . Samarinda : Sekda Kota Samarinda.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah*: Sekda Kota Samarinda.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian*. Renika Cipta. Jakarta. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Publik*. Edisi Revisi. Reneka Cipta. Jakarta
- Sajogyo. 1996. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta:PT. Bina Rena Pariwara (BRP)
- Winardi. 2002. *Motipasi Dan Pematipasian Dalam Menajemen*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Mursanto, IG. 2003. *Manajemen Kepegawaian*. Kanisius, Jakarta
- Miftah Thoha. 1983. *Kepemimpinan Dalam Menejemen*. Cetakan Kelima. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta